

Harga Cabai Fluktuatif, Pedagang Batasi Stok

YOGYA (KR) - Meski sejumlah upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, cabai dan sayuran, tapi harga cabai dan sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional belum stabil (masih fluktuatif). Menyikapi harga-harga yang belum stabil tersebut, pedagang di pasar tradisional memilih untuk tidak membeli barang dagangan dalam jumlah banyak. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian.

menjual dengan harga sesuai harga pasaran. Dirinya memilih tidak mengikuti harga pasar yang setiap hari bisa berubah.

"Pokoknya kita dipermainkan harga cabai, dampaknya pedagang seperti saya jadi repot. Tapi saya tetap menjual dengan harga sesuai dengan harga kulakan," katanya.

Ketika diminta komentar hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Syam Arjayanti me-

nyatakan, kenaikan harga cabai sulit dikendalikan. Karena harganya fluktuatif sekali sehingga tidak berani membeli dalam jumlah banyak. Dikhawatirkan barang akan cepat habis. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah disamping persediaan di pasar murah dengan jumlah tidak terlalu banyak juga mengajak gerakan masyarakat memenuhi kebutuhan dengan cara menanam di halaman rumah. Karena untuk

mengatasi kondisi harga cabai yang tidak stabil perlu peran semua pihak termasuk masyarakat. Dengan gerakan masyarakat terbiasa menanam

cabai di pot, ini dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

"Saya kira untuk memenuhi kebutuhan cabai, langkah baiknya apabila

masyarakat mulai membiasakan diri masing-masing menanam cabai, sebab kebutuhan untuk rumah tangga kan sebenarnya kecil, berbeda dengan

industri rumah makan atau restoran. Saya kira apabila hal itu bisa dilakukan dapat meredam gejolak harga di pasaran," terangnya. (Ria)-f

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Permata, Tbk, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, melalui jasa pralelang PT. Trimitra Lelang Mandiri terhadap jaminan debitur: **FANI SUWITO**

Objek Lelang	Nilai Limit	Jaminan Lelang
Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHGB No. 261/Terban, luas 153 m ² atas nama Fani Suwito, terletak di Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp.4.314.999.000,-	Rp.870.000.000,-

Keterangan :

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dapat dilihat sejak pengumuman diterbitkan. Syarat lainnya akan diumumkan pada saat pelaksanaan lelang. Keterangan lebih lanjut hub PT. Trimitra Lelang Mandiri/Bp. Ardi Wijayanto 08122670488 atau 081903298877

Deskripsi Persyaratan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	: e-Auction Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id)
Hari/ Tanggal	: Kamis/30 November 2023
Batas Akhir Penawaran	: 14.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
Palunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain
Bea Lelang Pembeli	: 2 % dari harga terbentuk lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta

Yogyakarta, 16 November 2023
td

PT Trimitra Lelang Mandiri PT Bank Permata, Tbk



MASYARAKAT HARUS DIBERI APRESIASI

Skema Penanganan Sampah Butuh Konsistensi

YOGYA (KR) - Skema penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta membutuhkan konsistensi. Hal ini agar gerakan yang sudah dilakukan bersama masyarakat tidak semakin luntur. Masyarakat baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah yang telah mandiri dalam menangani sampah, juga perlu diberikan apresiasi.

"Mengelola sampah memang menjadi tanggung jawab semua pihak, tetapi pemerintah perlu terus memberikan contoh dan teladan. Harus konsisten. Sehingga program yang sudah diluncurkan di awal, secara terus menerus dievaluasi agar kualitasnya tidak semakin menurun," ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Subagyo.

Subagyo yang duduk di Komisi C juga berharap, pemberdayaan di tingkat masyarakat bisa semakin kuat. Pasalnya partisipasi masyarakat untuk menjaga konsistensi penanganan sampah memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi jika di suatu wilayah masih belum sepenuhnya berdaya dalam mengelola sampah, maka jangan lantas dipaksa untuk bisa mandiri. Beberapa masalah teknis seperti terbatasnya sarana pengolahan sampah dan sumber daya manusia yang ada di wilayah harus benar-benar diperhatikan. "Mungkin ada wilayah yang sudah bisa mandiri karena

Subagyo
Fraksi PDI Perjuangan



KR-Istimewa

fasilitas dan sumber dayanya memadai. Tetapi bisa jadi ada juga wilayah yang kesulitan karena sumber dayanya terbatas. Sehingga jangan disamaratakan. Perlu ada pemberdayaan," imbuhnya.

Pemberdayaan yang dimaksud, imbuh Subagyo, bisa dengan membangun kesadaran secara terus menerus. Terutama sampah setiap warga mampu memilah sampah hingga benar-benar menyalakan residu. Sehingga selain penyediaan fasilitas pendukung, apresiasi bagi wilayah yang sudah mampu mandiri juga akan mendorong wilayah lain untuk terpacu agar bisa ikut mandiri.

Dirinya menilai, sudah banyak langkah nyata yang dilakukan oleh Pemkot. Akan tetapi membangun sinergi bersama masyarakat juga harus dilakukan tanpa henti. Pasalnya, setiap hari produksi sampah selalu terjadi sementara saat ini hampir semua depo sudah penuh dan lahan pengolahan sampah komunal di Kota Yogya juga sulit dipenuhi.

"Kami di lembaga dewan mendukung penuh strategi penanganan sampah di Kota Yogya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga akan kami dukung dalam pembahasan anggaran. Apalagi jika menyangkut gerakan pemberdayaan untuk mendorong kemandirian di masyarakat," tandasnya. (Dhi)-f

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN MUSYAWARAH DPRD KOTA YOGYAKARTA

Beririsan Tahapan Pemilu, Optimalisasi Agenda Persidangan



Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta bersama Forkompinda.



Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta memimpin jalannya sidang.



Sidang paripurna di gedung DPRD Kota Yogyakarta.

YOGYA (KR) - DPRD sebagai salah satu lembaga politik tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan. Seiring tahapan Pemilu 2024 yang mulai beririsan dengan agenda persidangan di lembaga dewan, menuntut peran Badan Musyawarah agar tidak semakin berbenturan. Optimalisasi agenda persidangan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

Sesuai ketugasannya, Badan Musyawarah memegang kendali seluruh agenda pemusyawaratan. Setiap agenda yang sudah diputuskan menjadi pertimbangan utama bagi alat kelengkapan lain. Bahkan jadwal yang sudah diputuskan tidak mampu diselesaikan, maka bisa berdampak sistemik. Hal ini karena hampir semua anggota dewan di DPRD Kota Yogyakarta bakal kembali bertaga sebagai kontestan calon wakil rakyat pada Pemilu 2024. Sementara akhir bulan ini masa kampanye sudah mulai digulirkan.

Berdasarkan pengalaman selama pemilu digelar, pada masa kampanye para kontestan disibukkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kontes. Hal itu lumrah karena kampanye merupakan hak yang diberikan bagi setiap kontestan serta menjadi sarana yang sah dan tepat dalam menyapa masyarakat. Dengan demikian pada masa kampanye kegiatan persidangan harus benar-benar disesuaikan agar mampu mencapai kuorum.

Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta H Danang Rudyatmoko, mengaku dari aspek internal dewan pihaknya sudah menjadwalkan semua kegiatan DPRD harus selesai di bulan ini. "Paling tidak akhir November ini kami harapkan kegiatan seluruh alat kelengkapan dewan sudah bisa diselesaikan. Makanya kami atur agenda persidangan sampai sebelum masa kampanye bergulir," ungkapnya.

Sesuai agenda yang sudah dijadwalkan, dalam sepekan ini seluruh komisi yang ada di DPRD Kota Yogyakarta marathon menggelar rapat pembahasan bersama mitra kerja eksekutif. Terutama menyangkut rencana kegiatan anggaran (RKA) tahun 2024 yang sudah dijabarkan hingga tingkat teknis. Danang menambahkan, jika pekan ini masih ada pembahasan yang belum mampu diselesaikan, masih ada waktu pada pekan depan. Akan tetapi maksimal pada 23 November 2023 sudah tidak ada kebijakan yang belum dituntaskan. Pasalnya pada 24 November 2023 dijadwalkan sidang paripurna untuk persetujuan bersama RAPBD 2024 serta penetapan Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Oleh karena itu ketika masuk masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai pada 28 November 2023, tidak ada lagi agenda persidangan yang sifatnya mendesak. Apalagi pada akhir tahun anggaran sudah tidak ada

kegiatan karena memasuki tutup buku. "Kami sangat menghargai agenda Pemilu 2024 yang masa kampanyenya hanya 75 hari. Sehingga waktu tersisa ini tinggal menyelesaikan masalah internal saja," tandasnya.

Badan Musyawarah pada sisa waktu persidangan efektif kali ini juga tidak lepas dari proses monitoring kegiatan alat kelengkapan dewan. Tiga pimpinan Badan Musyawarah yang juga ex officio Pimpinan Dewan saling berbagi tugas dalam melakukan pengawasan. Sehingga jika ada salah satu alat kelengkapan yang mengalami deadlock dengan tim eksekutif, Badan Musyawarah bisa langsung mengambil peran. Seperti Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang pekan lalu mengalami jeda buntu, pekan ini kembali dijadwalkan pembahasan lanjutan bersama tim eksekutif tanpa mengganggu agenda persidangan yang dilakukan oleh alat kelengkapan lainnya.

Selain memastikan seluruh agenda persidangan di akhir tahun ini mampu diselesaikan sesuai jadwal, Badan Musyawarah juga sudah merancang kegiatan awal tahun 2024. Hal ini karena masih beririsan dengan agenda kampanye namun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 juga harus mulai dibahas sejak awal tahun 2024. Diawali dengan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan, musrenbang tematik maupun pokok pikiran dewan. "Untuk rencana kerja itu kita diberi waktu sampai Februari. Padahal pada bulan-bulan itu kan tahapan Pemilu 2024 mencapai puncak-puncaknya. Mulai dari pemungutan suara kemudian rekapitulasi dari tingkat TPS hingga kota. Ini harus kami rencanakan betul agar jangan sampai kepentingan Pemilu 2024 maupun penyelenggaraan pemerintahan tersendat," urainya.

Oleh karena itu, Badan Musyawarah mengambil kesepakatan untuk menarik maju agenda kedewanan pada awal tahun depan. Salah satunya agenda reses awal tahun bakal digelar Januari atau maksimal awal Februari 2024. Masa reses yang berlangsung selama enam hari tersebut menjadi sangat krusial dalam menajaring aspirasi konstituen. Usulan-usulan yang disampaikan akan direkam dengan baik oleh setiap anggota dewan yang mengambil jatah reses, kemudian diakomodir dalam pokok pikiran dewan.

Seiring dengan itu pula, musrenbang tingkat kelurahan dan musrenbang tematik turut digulirkan. Harapannya ada keterpaduan antara hasil reses dengan hasil musrenbang. Dengan begitu akan memudahkan dalam proses penyusunan pra rencana kerja.

Tugas dan wewenang Badan Musyawarah juga telah dirinci dalam tata tertib dewan. Selain mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan dari seluruh alat kelengkapan, agenda DPRD dalam satu tahun masa sidang juga ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Begitu pula perkiraan waktu penyelesaian setiap masalah serta jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah. Khusus waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah sudah ditetapkan maksimal tiga bulan setelah panitia khusus dibentuk. Tenggat waktu itu telah disepakati bersama dengan Bapemperda yang memiliki kewenangan terhadap Propemperda dalam satu tahun masa sidang.

Keputusan Badan Musyawarah bahkan bersifat mengikat. Hal ini karena perubahan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat dilakukan melalui rapat paripurna. "Setiap fraksi memiliki wakil di Badan Musyawarah. Sehingga sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah, setiap anggota selalu berkonsultasi dengan fraksi terlebih dahulu," imbuh Danang.

Wakil Ketua I Badan Musyawarah HM Fursan, mengungkapkan kunci utama agar semua agenda tidak meleset dari jadwal ialah komitmen untuk saling berkoordinasi. Seperti memasuki akhir tahun masa sidang pada tahun ini pihaknya turut mengawal capaian kinerja dan program dari masing-masing alat kelengkapan. Salah satunya realisasi pembahasan rancangan peraturan daerah yang dipastikan tuntas 100 persen. Hasil dari kinerja itu pun akan mempengaruhi rencana kerja legislatif pada tahun selanjutnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua II Badan Musyawarah Dhiyan Novitasari. Menurutnya, pemusyawaratan merupakan model yang melekat dalam ketugasan dewan. Pasalnya, dalam pemusyawaratan tersebut terjadi pertukaran pendapat dari berbagai pihak terhadap suatu permasalahan guna diputuskan kebijakan terbaik sesuai kemaslahatan bersama dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pihaknya dalam menyusun agenda pemusyawaratan juga mempertimbangkan banyak hal. Terhadap kegiatan yang dijalankan, Badan Musyawarah melakukan kroscek secara berkala mengenai capaian kinerja.

"Kita saling koordinasi. Baik dengan alat kelengkapan lain maupun unsur yang ada di sekretariat mulai bagian perundangan, persidangan, umum, keuangan dan lainnya. Sehingga kalau ada persoalan yang bisa berdampak pada agenda lain, bisa segera dicarikan solusinya," paparnya. (Dhi)-f